



## GELOMBANG PHK KUARTAL PERTAMA TAHUN 2016

Ari Mulianta Ginting\*)

### Abstrak

*Kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan ditambah dengan harga komoditas yang mengalami penurunan memberikan dampak yang cukup serius bagi perekonomian Indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah terpukuhnya sektor Industri sehingga mengakibatkan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dari data yang berhasil dikumpulkan, perusahaan seperti Panasonic, Toshiba, perusahaan migas, dan perusahaan farmasi telah melakukan PHK terhadap buruh dan karyawannya. Untuk mencegah gelombang PHK yang lebih besar, sudah waktunya stakeholder terkait duduk bersama mengatasi hal tersebut. Pemerintah bersama dengan pelaku usaha didampingi oleh DPR RI harus membuat kebijakan yang tepat sasaran. Salah satunya dengan mempercepat pengeluaran secara intensif melalui belanja pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan sarana fisik lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja. Apabila PHK menjadi langkah terakhir bagi perusahaan, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa buruh yang terkena PHK mendapatkan haknya secara penuh.*

### Pendahuluan

Laporan Bank Dunia terhadap kondisi perekonomian menyebutkan bahwa kondisi finansial ekonomi internasional mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tantangan pengelolaan ekonomi makro di Indonesia dan risiko penurunan terhadap prospek jangka pendek. Penghindaran risiko global meningkat karena kekhawatiran perlemahan pertumbuhan Tiongkok dan volatilitas pasar keuangan, serta prospek jangka pendek kebijakan moneter Amerika Serikat (AS). Selain itu, prospek bagi

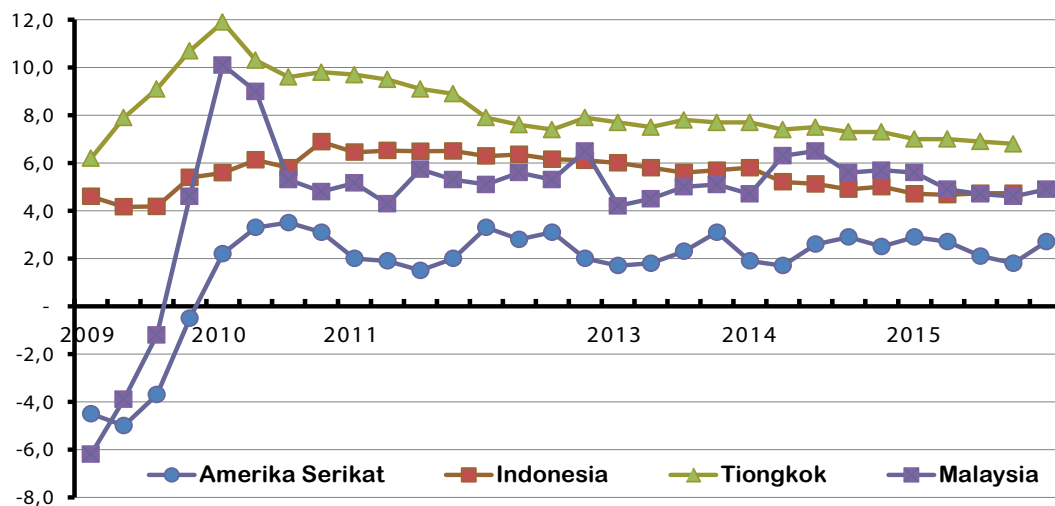
pasar berkembang dan perdagangan dunia semakin melemah dengan kelebihan pasokan, mendorong penurunan harga-harga komoditas.

Di Indonesia, perlambatan pertumbuhan dan peningkatan harga bahan pangan telah menghambat laju penurunan kemiskinan. Ditambah dengan tekanan kurs yang berlanjut yang membatasi pilihan kebijakan moneter. Bersamaan dengan itu, rendahnya harga komoditas global dan perlambatan pertumbuhan di negara-negara berkembang dan perdagangan

\*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: ari.ginting@dpr.go.id



Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2009-2015



Sumber : Bank Indonesia (2016).

dunia menyebabkan ekspor asal Indonesia mengalami penurunan. Dengan lemahnya lingkungan luar negeri, PDB riil tumbuh dengan laju yang moderat sebesar 4,79% *year on year* pada tahun 2015. Perlambatan pertumbuhan ekonomi bukan hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga negara lainnya. (lihat Gambar 1).

Sektor industri manufaktur yang selama ini merupakan *backbone* yang menyokong pertumbuhan utama perekonomian nasional juga mulai rapuh. Rapuhnya sektor industri di Indonesia dapat terlihat dari mulai menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDB secara nasional. Jika dibandingkan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014, maka kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan dari 1% menjadi 0,92%. Ekonom *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Dzulfian Syafrian, mengatakan bahwa dampak dari perlemahan nilai tukar dan perlambatan perekonomian global beberapa bulan terakhir membuat rata-rata pabrik di Indonesia mengalami kenaikan ongkos produksi. Seperti diketahui bersama, konten bahan impor dari industri nasional sangat tinggi. Tingginya bahan baku impor menjadi bumerang bagi industri saat daya beli masyarakat sedang melemah. Dampak akhirnya sudah jelas terjadi, industri melakukan efisiensi.

Banyak faktor yang menyebabkan semakin tertekannya perekonomian

khususnya sektor industri selain akibat dampak dari kondisi perlambatan global seperti yang telah dijelaskan. Masalah lain yang cukup menekan sektor industri adalah kenaikan upah buruh. Kenaikan upah buruh tersebut sering kali tidak diiringi dengan produktivitasnya. Kenaikan upah buruh di Indonesia juga lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari kenaikan upah buruh pada tahun 2016 yang naik rata-rata sebesar 11,5% padahal pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya sebesar 4,79%. Belum lagi jumlah waktu kerja yang bisa berbeda hingga 20%. Kondisi tersebut membuat sektor industri mau tidak mau harus melakukan efisiensi dan rasionalisasi pekerja serta penutupan sektor usaha yang dianggap tidak menguntungkan bagi industri.

### Gelombang PHK di Indonesia

Kondisi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berdampak terhadap ancaman pengurangan ribuan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri tersebut. Setidaknya terdapat tiga perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang melakukan PHK, yaitu Toshiba, Panasonic, dan PT DMC Teknologi Indonesia. Menurut Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), PHK dilakukan karena perusahaan tersebut tutup. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyoroti kondisi perekonomian global dan anjloknya harga minyak dunia dapat membuat ribuan buruh migas terancam PHK.

Tabel 1. Jumlah Buruh yang Terkena PHK sejak Januari 2016

Klaim Pemerintah	Klaim KSPI	Klaim Pelaku Usaha
Jumlah buruh yang terkena PHK menurut Kementerian Tenaga Kerja adalah sejumlah 1.377 orang	Jumlah Buruh yang terkena PHK di PT. Panasonic Lighting sejumlah 1.700 orang Jumlah buruh yang terkena PHK di PT. Toshiba Indonesia sejumlah 970 orang Jumlah buruh yang terkena PHK di PT Ford Motor Indonesia sejumlah 35 orang	Jumlah buruh yang di PHK menurut PT Panasonic Lighting berjumlah 408 orang mundur dan 50 pindah lokasi pabrik Jumlah buruh yang terkena PHK dari PT Toshiba Indonesia sejumlah 362 orang atau 40 persen dari 906 karyawan.
Potensi penambahan buruh yang terkena PHK adalah sejumlah 2.562 orang	Potensi penambahan buruh yang terkena PHK hingga 2.000 berasal dari 44 dealer Ford Motor di Indonesia	-

Sumber: Data diolah (2016)

Data mengenai jumlah PHK yang sudah terjadi sejak tahun 2016 berbeda antara versi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), versi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan versi Perusahaan. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja jumlah buruh yang terkena PHK sejak Januari 2016 sebanyak 1.377 orang dan potensi penambahan buruh yang akan terkena PHK sebanyak 2.562 orang. Data ini jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan data jumlah buruh yang di PHK menurut versi KSPI, yaitu 1.700 orang untuk Perusahaan PT. Panasonic Lighting ditambah 970 orang untuk PT. Toshiba Indonesia dan 35 orang dari PT Ford Motor Indonesia (lihat Tabel 1).

Di luar itu, PHK juga sudah membayangi industri padat karya yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wakil Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY, Endro Wardoyo, mengatakan bahwa PHK telah menghantui seluruh sektor industri di DIY. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian yang lesu. Daya beli masyarakat juga masih rendah, sehingga penjualan ataupun pemasukan perusahaan menjadi tidak menggembirakan. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan upah buruh yang menjadi momok bagi pengusaha dan industri yang ada di DIY. Dengan demikian, keputusan PHK menjadi jalan terakhir yang ditempuh apabila tidak ada jalan keluar dan tergantung kepada kebijakan industri masing-masing. Sampai dengan Februari 2016 sudah terdapat 85 kasus PHK dari sejumlah perusahaan di bidang perdagangan dan pertekstilan.

## Pecegahan PHK Massal

Menghadapi permasalahan gelombang PHK yang terjadi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan melakukan pengawasan terhadap industri yang melakukan PHK melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang tengah dalam tahap penyusunan. PP tersebut akan mewajibkan industri untuk melaporkan kegiatan produksinya secara berkala. Dengan adanya laporan kegiatan produksi berkala, pemerintah dapat mencegah kegiatan produksi yang berhenti secara mendadak atau investor yang henggang secara tiba-tiba dari Indonesia. Artinya, Kemenperin sekarang ini akan terus memantau secara intensif industri secara keseluruhan agar jika ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh industri, semua *stakeholder* dapat dengan cepat duduk bersama untuk menyelesaikannya sebelum terjadi PHK.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkilfi Hasan meminta pemerintah memperbanyak proyek padat karya sebagai alternatif untuk meredam gelombang PHK. Zulkifli Hasan juga meminta pemerintah memberikan jaminan suasana yang nyaman bagi para investor jika ingin berinvestasi di Indonesia. Di tengah situasi yang serba sulit seperti ini maka pemerintah harus memberikan kondisi dan iklim investasi yang mendukung peningkatan investasi di Indonesia. Terlebih bagi investor yang ingin membuka usaha di bidang padat karya, harus menjadi prioritas dan diberikan fasilitas khusus.

Kemenaker mengklaim telah menggelar pertemuan dengan sejumlah perusahaan yang akan melakukan PHK

terhadap para karyawannya. Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (P3HI) Kemenaker, Sahat Sinurat, mengatakan telah meminta kepada perusahaan untuk melakukan efisiensi terlebih dahulu sebelum melakukan PHK. Beberapa opsi yang diminta oleh Kemenaker sebelum PHK dilakukan adalah mengurangi jam kerja, lembur, dan tidak memperpanjang kontrak kerja.

## Penanganan Korban PHK

Lebih lanjut mengenai PHK yang dilakukan oleh perusahaan, Pengamat ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Titik Handayani, menyatakan bahwa pemerintah harus dapat melindungi hak-hak normatif buruh seperti pesangon. Menurut Titik, pemerintah harus memikirkan solusi untuk menampung limpahan penganggur baru. Program-program yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan harus diefektifkan.

Menurut Titik, pemerintah bukan hanya pada posisi mencegah terjadinya PHK. Jika beberapa opsi tersebut tidak mampu menyelamatkan perusahaan, maka PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni memberikan pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak bagi buruh yang terkena PHK. Kemenaker harus secara jelas berpihak kepada buruh korban PHK dan memantau proses pemberian hak yang harus diterima oleh buruh. Hal ini dimaksudkan agar buruh korban PHK tersebut mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka dan perusahaan tidak lagi menunda-nunda melaksanakan kewajibannya kepada mereka.

Menurut penulis, momen perlambatan perekonomian global yang berdampak hampir pada semua industri nasional yang pada akhirnya berdampak terhadap gelombang PHK, harus disikapi secara bijak oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya mempercepat pengeluaran secara intensif melalui belanja pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan sarana fisik lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini harus dilakukan secara cepat dan masif. Penyerapan tenaga kerja yang besar di proyek-proyek pemerintah, terutama di sektor infrastruktur, dapat secara cepat mengurangi pengangguran dan meredam gelombang PHK yang terjadi saat ini.

## Penutup

Kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan, harga komoditas di pasar global yang menurun serta harga minyak mentah yang berada pada level terendah telah memberikan dampak serius terpukulnya sektor industri yang ada sehingga berujung pada upaya efisiensi, rasionalisasi, dan pengurangan jumlah karyawan. Di beberapa tempat dan lokasi, sejumlah perusahaan telah melakukan PHK terhadap buruh.

Semua *stakeholder*, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun DPR RI harus duduk bersama untuk membicarakan tindakan konkret untuk mengatasi hal tersebut. Tindakan preventif dan proaktif harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Namun jika PHK telah menjadi jalan terakhir, Pemerintah dan DPR RI harus memantau secara intensif hak yang harus diterima oleh buruh secara penuh. Jangan sampai gelombang PHK yang sudah terjadi menjadi lebih besar dan menghantam perekonomian nasional.

## Referensi

- “85 Kasus PHK Terjadi di DIY”, *Kedaulatan Rakyat*, 11 Februari 2016.
- “Belanja Pemerintah Redam PHK Masal”, *Koran Tempo*, 9 Februari 2016.
- “Cegah PHK, Kemnaker Tawarkan Solusi Efisiensi”, *Kontan*, 9 Februari 2016
- “Cegah PHK Massal, Daya Beli Masyarakat Harus Ditingkatkan”, *Sindo*, 9 Februari 2016.
- “Daerah Menanggung Dampak Gelombang PHK”, *Koran Tempo*, 11 Februari 2016.
- “Ditengah Volatilitas Dunia”, *World Bank Report*, Oktober 2015.
- “Kemenperin Awasi Industri PHK Karyawan”, *Sindo*, 9 Februari 2016.
- “Lindungi Pekerja Korban PHK”, *Pelita*, 11 Februari 2016.
- “Pemerintah Harus Lindungi Pekerja Korban PHK”, *Neraca*, 9 Februari 2016.
- “Serikat Pekerja Ungkap PHK Massal”, *Republika*, 9 Februari 2016.